

FOTO/ANT

PERESMIAN

MASJID BSI DI BROMO

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi (kanan) saling berbincang di sela-sela peresmian Masjid BSI di kawasan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (22/7). Masjid yang berada pada ketinggian 2.680 meter di atas permukaan laut (MDPL) tersebut diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi umat serta dapat mendukung pemulihan sektor pariwisata di kawasan Gunung Bromo.



Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR Dalam Rangka Percepat Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional

"Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada triwulan I-2022," kata Airlangga Hartarto.

JAKARTA (IM) - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan Juni

2022 sebesar Rp179,67 triliun.

"Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7).

Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022

yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.

Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.

Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total

debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021.

"Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Airlangga.

Selain membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. • dro

LPEI Bersama BSI Sinergi Tingkatkan Ekspor Nasional

JAKARTA (IM) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, meningkatkan sinergi ekspor nasional yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan kerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pada tahap awal, BSI telah bekerja sama dalam hal pemberian pembiayaan kepada LPEI senilai Rp 3 Triliun untuk pengembangan bisnis LPEI.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, siap mendukung akselerasi bisnis LPEI baik dari sisi infrastruktur, layanan dan digital untuk mendorong peningkatan ekspor nasional.

Peningkatan ekspor perlu terus diupayakan secara konsisten oleh seluruh stakeholders. Sebab dengan surplusnya neraca perdagangan seperti yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni lalu, hal ini akan turut memutar roda perekonomian dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

"Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat mendukung peran LPEI dalam memperkuat transaksi ekspor nasional. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat kami untuk terus berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional, termasuk ekspor Indonesia," ujar Hery di laman Kemenkeu, Jumat (22/7).

Hery juga berharap Bank Syariah Indonesia bisa menjadi mitra yang kuat dari LPEI, yaitu untuk pengembangan ekspor melalui pembiayaan berbasis syariah dan pendanaan maupun transaksi digital. Hal itu diperkuat dengan

cacatan kinerja pembiayaan BSI yang kian tumbuh positif dengan kualitas pembiayaan yang semakin membaik dan terjaga.

"Maka dengan adanya kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis dari seluruh aspek. Baik di BSI maupun LPEI terutama peningkatan kualitas ekspor Indonesia,"ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirto mengungkapkan optimisme senada. "Kami meyakini sinergi dan kolaborasi yang dibangun pada akhirnya akan mendorong terciptanya pelaku usaha yang berdaya saing serta berkontribusi kepada ekspor nasional secara berkelanjutan. Besar harapan kami, kerjasama ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan," ujarnya. • dro

Kementerian ESDM Akan Bangun 33.476 BMN Infrastruktur EBT

JAKARTA (IM) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun 33.476 unit Barang Milik Negara (BMN) infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun ini dengan nilai mencapai Rp483,11 miliar.

"2022 ini ada 33.476 unit dengan nilai Rp483 miliar," kata Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Sumartono dalam acara Bincang Barong DJKN Kemenkeu di Jakarta, Jumat (22/7).

Secara rinci 33.476 unit BMN infrastruktur EBT ini meliputi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) MYC tahun ke-2 sebanyak 1.454 unit dengan pagu Rp19,73 miliar dan PJU-TS Single Year sebanyak 20.456 unit Rp301,65 miliar.

Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebanyak 108 unit dengan pagu Rp59,64 miliar, Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) MYC tahun ke-2 sebanyak 11.365 unit dengan anggaran Rp78,3 miliar. Terakhir adalah tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Multi Hydro (PLTMH) dengan pagu anggaran Rp23,77 miliar.

Sumartono menjelaskan untuk APDAL merupakan program baru Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM yang telah dilakukan sejak tahun lalu dan dilanjutkan pada tahun ini.

APDAL sendiri adalah suatu piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik ber-

basis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik.

Kebijakan penyediaan APDAL tersebut seiring arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada 2020 yakni melistriki 433 desa yang tersebar di empat provinsi meliputi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wilayah pendistribusian APDAL pada 2021 dan 2022 meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan menjangkau 215 desa sebanyak 12.597 unit.

Penerima hibah BMN paket APDAL adalah pemerintah desa setempat yang menerima dan mengelola paket APDAL, termasuk cadangan APDAL.

Kementerian ESDM juga mendorong penyediaan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mencapai target bauran energi sebesar 23 persen di Indonesia pada 2025. Sumartono menyatakan penyediaan infrastruktur EBT ini salah satunya dilakukan melalui BMN.

"Jadi pengelolaan BMN ini dalam rangka mendukung EBT," katanya.

Ia menegaskan penyediaan infrastruktur EBT harus dilakukan karena bauran energi di Indonesia hingga 2021 baru mencapai 11 persen dari target 23 persen pada 2025.

Sejauh ini beberapa jenis program infrastruktur EBT yang telah dilakukan adalah berbasis surya yaitu Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), PLTS Atap, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Penerangan Jalan Umum (PJU). • hen



IDN/ANT



PENGEMBANGAN KAWASAN PARAMOUNT PETALS
Direktur Utama PT Jasamarga Related Business (PT JMRB) Dian Takdir Badrsyah (kedua kanan) berjabat tangan dengan Presiden Direktur PT Paramount Enterprise International Ervan Adi Nugroho (kedua kiri) disaksikan Direktur Paramount Land M Nawawi (kiri) dan Direktur Pengembangan Kawasan PT JMRB Bayu Nurbaya (kanan) usai penandatanganan perjanjian joint operation pengembangan kawasan properti Paramount Petals di Tangerang, Banten, Kamis (21/7). Paramount Petals merupakan kota mandiri baru di barat Jakarta seluas kurang lebih 400 hektare yang mengusung konsep one-stop living, saling terintegrasi antara hunian, komersial, bisnis dengan fasilitas kota lainnya.



Vale Kembangkan Pengolahan Biji Nikel untuk Mobil Listrik

JAKARTA (IM) - PT Vale Indonesia Tbk telah menandatangani nota kerja sama tidak mengikat dengan Huayou China dan produsen mobil dunia Ford Motor untuk memproses bijih nikel di Blok Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara.

CEO dan Presiden Direktur Vale Febrinyan Eddy mengatakan kerja sama itu mengacu kerangka perjanjian pengembangan fasilitas pengolahan High-Pressure Acid Leaching (HPAL) di Blok Pomalaa yang telah disepakati antara Vale dan Huayou pada April 2022.

"Total kapasitas produksi hingga mencapai 120.000 metrik ton kandungan nikel per tahun dalam bentuk mixed hydroxide precipitate," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (22/7).

Menurutnya ikut sertanya Ford pada kemitraan tersebut semakin menegaskan jika keberadaan Indonesia dalam industri mobil listrik dunia begitu penting, ditopang dukungan masyarakat dan sumber daya alam.

Wakil Presiden Eksekutif Base Metals Vale selaku Komisaris Utama Vale Deshnee Naidoo menuturkan, perusahaannya memiliki rekam jejak operasi selama beberapa dekade di Indonesia dalam memproduksi nikel secara aman dan berkelanjutan.

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra lain yang sejalan dan senantiasa mengedepankan aspek keberlanjutan pada generasi baru

proyek pengembangan yang didesain untuk memberikan dampak minimal terhadap lingkungan serta bermanfaat bagi sosial ekonomi lokal dan nasional di masa depan," katanya.

Sementara itu Ford menilai kerja sama tiga pihak tersebut merupakan cara kreatif untuk memastikan kebutuhan nikel Ford dan jutaan pelanggan kendaraan listrik Ford bisa terpenuhi.

"Hal ini juga selaras dengan apa yang ingin dicapai Ford dalam setiap prosesnya, yakni senantiasa berkomitmen menjaga lingkungan, sosial, dan tata kelola saat ini dan di masa depan," kata Wakil Presiden Ford Model EV Industrialization Lisa Drake.

Sementara Executive Vice Chairman Huayou George Fang mengatakan pihaknya sebagai salah satu penghasil material baterai Li-ion global telah melakukan berbagai upaya yang konsisten dalam menjalankan keseluruhan cakupan industri dari nikel dan kobalt untuk menjadi material baterai katoda dengan emisi karbon sangat rendah.

"Kemitraan bersama Ford dan Vale tidak hanya akan menjamin suplai yang stabil dan berkelanjutan untuk pelanggan, namun juga akan membawa dampak positif pada perkembangan industri kendaraan listrik dan ekonomi Indonesia," kata George.

Penyelesaian pembangunan fasilitas HPAL, dan mulai mengedepankan aspek keberlanjutan pada generasi baru

Laba Pegadaian Tumbuh 36,15 Persen

JAKARTA (IM) - PT Pegadaian membukukan laba bersih sebesar Rp1,77 triliun pada semester I-2022. Angka ini naik 36,15 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,30 triliun.

Laba tersebut didukung oleh pendapatan usaha Pegadaian yang mengalami kenaikan secara tahunan (yoy) dari Rp10,44 triliun per 30 Juni 2021 menjadi Rp10,86 triliun pada periode yang sama tahun 2022. Sementara itu, aset Pegadaian pada semester I-2022 ini tercatat sebesar Rp68,4 triliun. Angka tersebut tumbuh dari posisinya di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp67,8 triliun.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah yang tetap loyal menggunakan produk Pegadaian hingga saat ini. Damar juga mengapresiasi para karyawan yang telah bekerja keras, sehingga kinerja perusahaan dapat tumbuh positif.

"Saya sangat bersyukur atas pencapaian kinerja perusahaan yang positif di semester tahun semester I tahun ini. Tentu pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan nasabah setia Pegadaian dan seluruh Insan Pegadaian yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan," ujar Damar dalam keterangan resmi, Jumat (22/7).

Ia menjelaskan, pertumbuhan kinerja perusahaan yang semakin baik, turut didorong oleh peningkatan jumlah na-

sabah Pegadaian sebesar 11,11 persen dari 18 juta orang pada Juni 2021 menjadi 20 juta orang pada Juni 2022.

"Insyaallah, pencapaian kinerja positif yang berhasil diraih oleh perusahaan saat ini, akan menjadi motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian untuk terus mencatatkan kinerja lebih baik lagi di masa mendatang. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program transformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi digital," tuturnya.

Lebih lanjut Damar menyatakan, kegiatan perekonomian relatif tumbuh di masyarakat. Ditandai dengan naiknya outstanding pinjaman sebesar 5,13 persen dari Rp52,42 triliun pada Juni 2021 menjadi Rp55,11 triliun di Juni 2022.

Selain itu, melalui Holding Ultra Mikro, tiga entitas yaitu BRI, Pegadaian dan PNM juga semakin memperluas jangkauan co-location sentra layanan ultra mikro 'SenyuM' di sejumlah daerah di Indonesia.

Saat ini, tercatat terdapat lebih dari 600 outlet SenyuM yang siap melayani para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah, murah, cepat dan aman. Pegadaian juga secara serentak mulai semester II-2022 ini menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah di 4.086 outlet di seluruh Indonesia. Plafon pinjaman yang diberikan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 10 juta per nasabah. Biaya pengelolaan (mu'nah) yang dikenakan 6 persen per tahun. • pan